

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas mengenai eksistensi mandor dalam pemanfaatan hutan di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji topik dengan menggunakan perspektif politik sosiologi. Politik merupakan proses pembentukan serta pembuatan keputusan terkhusus dalam negara. Selain itu politik menurut Harold D. Laswell dalam bukunya *Who Gets What, When, How* mengatakan politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (Laswell dikutip oleh (Budiardjo, 2008: 22). Maka dapat diartikan bahwa politik sosiologi yaitu gabungan antara bidang politik dan sosiologi untuk memberikan penjelasan pada variabel sosial dan politik. Diantara ilmu sosial, sosiologilah sebagai inti dan umum sifatnya. Sosiologi sebagai media ilmu politik dalam upaya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori sosiologi para sarjana ilmu politik dapat mengetahui sejauh mana stratifikasi dan tatanan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh misalnya kebijakan politik, legitimasi politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial (Budiardjo, 2008: 29).

Manusia merupakan makhluk sosial yang menjalankan hidupnya tidak bisa bergantung pada diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kelompok individu mestinya terdapat hubungan timbal balik untuk saling tolong-menolong guna untuk mencapai tujuan. Sosial kapital dapat digunakan manusia sebagai jembatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan manusia, individu, dan kelompok. Dalam pemanfaatan hutan di Desa Bareng terdapat Mandor yang memiliki sumber potensi sosial kapital. Menurut Nan Lin sosial kapital berakar dari jaringan sosial dan hubungan sosial yang dipahami sebagai sumber daya tertanam dalam struktur sosial yang diakses atau dimobilisasi melalui tindakan yang memiliki tujuan (Lin, 2001: 41). Hutan merupakan aset milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dibentuk dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki

wewenang dan tugas untuk mengelola sumber daya hutan milik negara di Pulau Jawa dan Madura.

Sesuai dengan regulasi pemerintah hutan terbagi antara hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 salah satu hutan yang ada di Indonesia adalah hutan produksi yang memiliki tujuan memproduksi hasil hutan. Melalui lembaga pemerintah Perum Perhutani memiliki kewajiban untuk mengelola hutan negara mulai dari pengamanan, produksi, hingga pemeliharaan. Dikarenakan Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2017 hutan Indonesia seluas 93,6 juta ha. Maka dalam pelaksanaan tugas perhutani membentuk beberapa divisi ditingkat regional yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Selain itu juga terdapat wilayah kerja yang didistribusikan perhutani yang ada ditingkat kabupaten hingga desa. Strategi dari perhutani tidak lain untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi perusahaan sesuai dalam pasal 11 ayat 1 sampai 3 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2010 mengenai penyelenggaraan usaha dengan tujuan untuk manfaat barang atau jasa yang berhubungan dengan perhutani.

Melalui penerapan kebijakan desentralisasi dengan cara memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan sumber daya kepada pemerintah di aras lokal dari pemerintah pusat. Adanya sistem desentralisasi dapat memberikan peluang untuk mengelola aset yang dimiliki negara untuk meningkatkan perekonomian salah satunya dari sektor kehutanan. Maka dari kebijakan mengelola hutan dari pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Namun, implementasinya pemerintah daerah tidak siap dalam pengelolaan hutan dan perlindungan hutan yang disesbakan kurangnya pengembangan kapasitas kelembagaan (peraturan, tenaga yang cakap, organisasi, pengalaman, dll). Lalu munculah penetapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2021 mengenai pemerintahan daerah merubah tatanan pengelolaan sumber daya alam yang awalnya sampai ke tingkat kabupaten/kota menjadi hanya pada tingkat provinsi. Pemberlakuan UU 23 tahun 2021 dalam perlindungan dan penguasaan hutan sebagai tugas pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan ke daerah agar

optimal dalam mengelola hutan pada setiap unit pengelolaan hutan dibentuk lembaga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Serta bagian pengamanan hutan yang sudah ditetapkan melalui berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 terdapat Polisi Khusus Kehutanan (POLHUT) mengenai perusakan hutan dan pencegahan pemberantasan hutan.

Diharapkan setelah perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi bisa mewujudkan negara yang demokratis, namun realitanya menghadirkan jaringan kekuasaan diarena politik lokal. Pada pelaksanaan pengelolaan hutan terdapat indikasi ditemukan kendala terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki ketergantungan pada lahan hutan. Pengelolaan hutan di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro banyak melibatkan pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan memilih melakukan monopoli hasil hutan dan pergeseran fungsi hutan menjadi pertanian dengan menggunakan aset milik negara, dikarenakan noteben masyarakat mayoritas sebagai petani. Banyaknya tantangan dalam pengelolaan hutan tersebut menjadikan mandor tetap eksis dikalangan masyarakat.

Sosok mandor hadir sebagai pelindung ekonomi masyarakat dalam jaringan sosial melalui peningkatan perekonomian secara ilegal. Melalui penguasaan sektor hutan jati yang ada di sekitar Desa Bareng yang dilangsungkan melalui cara sosial kapital. Kapitalisasi dipandang sebagai investasi atau produksi dari aktor individu. Mandor di Desa Bareng memperoleh nilai kewibawaan dari masyarakat dipandang sebagai aset sosial berdasarkan koneksi aktor dan akses ke sumber daya dalam jaringan atau kelompok di mana mandor berhasil mendominasi diantara anggota lainnya. Mandor berusaha untuk menjaga kepercayaan serta sumber daya dan gaya hidup, berdasarkan pendapat Lin tindakan untuk mendukung pemeliharaan dan penguatan sumber daya yang dimiliki disebut dengan cara ekspresif (Lin, 2001: 21). Dengan demikian, situasi seperti ini semakin kuat ikatannya dan juga semakin besar

kemungkinan sosial kapital yang diakses oleh mandor akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan tindakan ekspresif.

Lebih lanjut, Sumber daya kehutanan dapat diakses atau dimobilisasi hanya jika telah diidentifikasi dan dilokalisasi oleh aktor dan dapat dikapitalisasi jika memiliki ikatan langsung atau tidak langsung dibangun antara aktor dan mereka yang menempati posisi struktural yang signifikan melalui alokasi jaringan yang strategis. Melalui cara sosial kapital digunakan untuk mendapatkan informasi, pengaruh, kredensial sosial, dan penguatan yang meningkatkan hasil tindakan. Para Mandor yang memiliki potensi sosial kapital dengan mengkapitalisasi sumber-sumber kekuasaan tidak hanya dari kekayaan namun juga strata sosial. Maka mandor dengan ambisius secara substansial lebih akan menganalisis cara aktor-aktor mengakumulasi kompetensi praktis dapat mengorientasikan diri mereka sendiri di medan sosial yang mereka kenal, yaitu untuk membedakan, mengidentifikasi dan melokalisasi sumber daya hutan jati yang memiliki nilai ekonomi, dan berusaha untuk membangun hubungan yang paling dapat membantu mereka mendapatkan akses ke sumber daya yang diinginkan.

Tidak hanya memanfaatkan hasil hutan antar mandor juga menjalin kerjasama untuk membangun sinergisitas yangmana setiap bidang mandor mulai dari mandor keamanan hutan atau polisi hutan, mandor tanam, dan mandor pemeliharaan yangmana memiliki tugas dan kewenangan berbeda mulai dari keamanan hutan, mendata jumlah pohon di hutan, hingga batas patok lahan hutan. Kerjasama dilakukan untuk menjalankan kepentingan mandor terkait kehutanan dengan mengalih fungsikan lahan hutan menjadi lahan persawahan. Selain itu, mandor mulai menunjukkan bagaimana sumber daya dapat didefinisikan sebagai material dan barang simbolik yang mempunyai nilai untuk didistribusikan secara tidak merata dan dapat diakses secara berbeda oleh berbagai aktor. Motif yang digunakan untuk bertindak melindungi sumber daya dengan menggunakan tindakan instrumental dan tindakan ekspresif, dan disisi lain antara pertukaran ekonomi dan sosial masing-masing memiliki jenis rasionalitas dan logika mutualitas yang berbeda (Lin, 2001: 58). Tinjauan sosial

kapital milik Lin menjelaskan bahwasannya sumber daya yang dimiliki yang berasal dari pribadi jika digunakan untuk menjangkau jaringan sosial dalam lapisan masyarakat tidak akan cukup (Lin, 2001: 21). Seperti halnya pada penelitian ini mandor sering harus melampaui kepemilikan sumber daya ekonomi sendiri untuk menjangkau hubungan bersama orang lain, terutama dengan orang-orang diposisi struktural yang lebih tinggi dan lokasi jaringan yang strategis.

Adanya hubungan tersebut melahirkan simbiolisis mutualisme atau yang bisa disebut saling membantu dengan kata lain orang yang memiliki hubungan koneksi saling membantu, kemudian orang melakukan balas budi sebagai satu dari cara hubungan bekerja. Sehingga terkadang manusia tidak sengaja bahwa kegiatan yang dilakukan secara ilegal dijadikan sebagai sumber matapencarian. Dalam penjelasan yang lebih tajam secara teoritis, pembaca akan melihat dengan lebih baik bagaimana ikatan sosial itu dipahami, dihargai, dan digunakan oleh aktor yang kompeten sebagai saluran menuju sumber daya di luar sana tertanam dalam struktur dan jaringan. Sebagai pintu menuju sumber daya sebaliknya tidak dapat diakses oleh aktor, sehingga membantu mereka meningkatkan hasil dan efek dari tindakan memiliki tujuan yang akan dicapai.

Sebelum melakukan penelitian secara mendalam pada bagian ini penulis membandingkan dengan beberapa kajian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan acuan. Pertama hasil penelitian milik Romzy, Triwahyudianto, dan Wardani berjudul “Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Produksi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo Kabupaten Kediri” (2019). Dalam penelitian ini memberikan penegasan bahwasannya sosial kapital dapat digunakan sebagai strategi dalam pengelolaan hasil hutan produksi dikarenakan dari faktor kepedulian antara perum perhutani, LMDH, dan masyarakat gotong royong merawat hutan. Kepedulian tersebut disebabkan adanya keinginan masyarakat untuk melestarikan ekologi dan peningkatan ekonomi dari hasil hutan produksi. Perbedaan dari penelitian ini dari segi kasus terjadi di lapangan yaitu pada penelitian ini masyarakat sekitar ingin menjaga keamanan hasil hutan melalui sosial kapital guna untuk menjaga kelestarian

alam. Para stakeholder yang terkait menggunakan sosial kapital berupa kepercayaan, norma, dan jaringan untuk membantu menjaga pengelolaan hutan produksi. Sedangkan sosial kapital yang akan diteliti oleh penulis sumber daya digunakan untuk meningkatkan eksistensi mandor dalam meningkatkan perekonomian agar eksistensinya tetap terjaga.

Kedua hasil penelitian dari Nurinda, Alam, dan Sabar dengan judul “Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Pinang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang” (2021). Dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan sosial kapital dalam menghasilkan jaringan sosial pada kelompok tani. Sosial kapital disini digunakan oleh pemerintah melalui program perhutanan sosial mengenai legalkan masyarakat mengakses hutan. masyarakat memiliki hak dalam memanfaatkan kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk mengatasi masalah ekonomi. Sehingga untuk meluncurkan program HKm pemerintah memanfaatkan sosial kapital untuk membangun jaringan kepercayaan pada kelompok tani agar berkenan mengelolah HKm. Berbeda dengan penulis dimana sosial kapital dijadikan oleh aktor individu bukan pemerintah sebagai sumber kekuasaan dalam memanfaatkan hasil hutan serta merubah fungsi hutan menjadi persawahan, dikarenakan mayoritas penduduk sekitar sebagai petani.

Ketiga hasil penelitian milik Surati, Sylvani, Djaenudi, dan Septina berjudul “Modal Sosial Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Biomassa di Purwakarta Jawa Barat” (2004). Dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian kedua dimana upaya pemerintah untuk mengembangkan biomassa di Purwakarta menggunakan sumber sosial kapital. Dimana melalui cara membangun jaringan melalui persuasi kepercayaan pada kelompok tani dan tokoh masyarakat. Sehingga sosial kapital diperoleh melalui relasi yang dihasilkan antar individu dalam sosial kapital yang sudah ada sejak lama untuk mencapai tujuan perkembangan biomassa. Berdeda dengan topik pembahasan peneliti dimana sumber daya yang digunakan pada sosial kapital didapatkan sudah ada sejak dahulu sebagai warisan dari status sosial.

Dengan demikian jika kajian terdahulu menggunakan sosial kapital untuk masuk kepada jaringan sosial yang sudah terbentuk sejak dahulu agar kepentingan bisa tercapai. Namun penelitian ini menggunakan sosial kapital yang dimiliki oleh para mandor dari status sosial dari jabatan sebagai mandor perhutani untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar khususnya petani yang tidak memiliki lahan, pengusaha mebel, dan tokoh masyarakat yang berpotensi memiliki kepentingan dari keberadaan mandor untuk memanfaatkan hutan secara ilegal, melalui monopoli sektor kehutanan di tingkat lokal dengan memanfaatkan sosial kapital yang dimiliki oleh para mandor. Selain itu juga melalui sosial kapital terjadi hubungan interaksi sosial untuk saling memberikan keuntungan dari potensi hutan yang ada di wilayah Desa Bareng. Sehingga penulis mencoba melakukan penelitian mengenai bagaimana eksistensi mandor menggunakan sosial kapital dalam pemanfaatan hutan di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini akan melihat bagaimana mandor dalam menggunakan potensi sosial kapital untuk memanfaatkan hutan di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari realitas permasalahan bahwasannya terdapat mandor yang memanfaatkan sosial kapital yang didapatkan dari jabatan pekerjaan sebagai mandor atau pengawas pada lembaga perum perhutani. Melalui jabatan yang dimiliki menjadikan mandor memiliki kedudukan status sosial pada lapisan masyarakat Desa Bareng lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat mayoritas lainnya. Berdasarkan beberapa data yang didapatkan dari hasil pengamatan beserta dari data sekunder ditemui beberapa indikasi. Terdapat praktik pemanfaatan hasil hutan dan menjadikan fungsi hutan berubah menjadi lahan pertanian secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan mandor. Praktik tersebut dilakukan melalui cara memanfaatkan sumber kekuasaan dari sosial kapital yang dimiliki oleh mandor untuk mencapai kepentingan.

Mandor bisa dikatakan sebagai pemilik modal sumber daya karena berhasil memiliki hubungan sosial serta pada perekonomian yang

berpenghasilan tinggi dibandingkan para pekerja buruh dibawahnya. Mandor hadir disebabkan memiliki status sosial yang digunakan sebagai modal untuk membangun relasi kepada pihak pemangku kepentingan, hal demikianlah yang dimaknakan sebagai sosial kapital. Melalui potensi kepemilikan sosial kapital tersebut, mandor dihubungkan kepada kepemilikan dari suatu jaringan yang akan membangun hubungan timbal balik antar individu yang memiliki kepentingan dalam mengelola hutan. Gagasan mandor hadir sebagai kesempatan bisnis dengan menggunakan aset milik negara dengan cara memanfaatkan hutan. Dalam menjalankan praktik kegiatan tersebut tentunya mandor menggunakan strategi supaya tetap eksis. Strategi tersebut melalui cara memberikan pelayanan kepada klien dalam perdagangan kayu hasil hutan. Selain itu juga melalui cara memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dijadikan persawahan, bagi masyarakat Desa Bareng yang notabennya merupakan petani.

Adanya transformasi pelimpahan kekuasaan dari sentralisasi menjadi desentralisasi diharapkan bisa diselenggarakan secara efisien. Dimana urusan politik diarah lokal menjadi urusan rumah kepala daerah setempat. Pelimpahan pusat ke daerah semestinya bisa berjalan lancar karena tiap kepala daerah lebih mengetahui karakteristik permasalahan ditingkat lokal. Sehingga pemerintah daerah diharapkan bisa mengimplementasikan nilai-nilai desentralisasi dalam pemanfaatan hutan milik negara. Namun dari harapan tersebut pada kenyataannya upaya pemanfaatan hutan secara sehat belum tercapai. Adanya pergeseran kekuasaan malah menimbulkan kepentingan individu pada aras lokal. Sifat mandor dikenal sebagai monopolistis kegiatan ekonomi mereka dalam daerah kekuasaan yang telah ditetapkan. Stigma negatif dari adanya mandor selama ini dianggap memberikan dampak menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi tidak disadari bahwasannya melalui kejahatan ilegal dijadikan sebagai strategi mandor untuk memberikan pelayanan ekonomi ditingkat lokal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sehingga berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka didapat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mandor menerapkan sosial kapital dalam pemanfaatan hutan sebagai upaya menjaga eksistensi di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana mandor dalam menerapkan sosial kapital dalam memanfaatkan hutan sebagai upaya menjaga eksistensi di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat akademis

- a. Memberikan kontribusi untuk memperluas kajian keilmuan politik sosiologi khususnya perspektif tentang sosial kapital
- b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengangkat topik terkait sosial kapital dalam kasus kehutanan ditingkat lokal

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan referensi ke masyarakat terkait pemanfaatan hutan secara legal yang ada di Indonesia khususnya pada kehutanan di Bojonegoro Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras
- b. Menjadi evaluasi pemerintah berwenang terkait pembuatan kebijakan pengawasan pemanfaatan hutan secara tepat

1.6 Kerangka Konseptual dan Teoritik

1.6.1 Konsep Mandor

Dalam dunia pekerjaan terdapat mandor dimana dianggap memiliki kekuasaan dalam mengontrol jalannya sumber daya yang akan dicapai. Pada jaman kompeni mandor disebut sebagai *opzichter*, yangmana dalam menjalankan pekerjaannya mandor dibantu oleh pegawainya (Soeriadiredja, 2017: 21). Dapat dikatakan bahwasannya mandor ini termasuk orang kuat yang memiliki hubungan sosial serta memiliki penghasilan relatif tinggi dibandingkan pada pekerja yang lebih banyak melaksanakan beban

pekerjaan yang sifatnya tidak pasti serta tereksplorasi (Soeriadiredja, 2017: 23). Sampai saat ini mandor masih memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan dalam menjalankan kewenangan serta kekuasaan dalam menguasai suatu wilayah. Melalui kelebihan yang dimiliki mandor tersebut dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperluas potensi yang dimiliki diberbagai sektor salah satunya pemanfaatan hutan.

Tidak semua orang bisa menjadi mandor dalam memanfaatkan sumber daya hasil hutan yang ada, melainkan hanya segelintir orang saja yang memiliki potensi. Hal tersebut disebabkan mandor disini berperan sebagai penyalur kebutuhan para pekerja yang membutuhkan kayu, sehingga mandor memiliki informasi lebih mengenai hasil hutan untuk memenuhi permintaan pasar. Upaya keberhasilan mandor dalam memperoleh informasi tidak lain didapatkan dari adanya hasil jaringan sosial, kemungkinan bisa didapatkan dari relasi aktor yang terlibat dalam struktur organisasi perhutani. Tidak heran jika setiap orang ingin meraih posisi sebagai mandor dari potensi keuntungan tersebut. Selain jabatan sebagai mandor dilingkup daerah diimpikan bagi para buruh label buruh dapat meningkatkan status sosial dan juga mendapatkan keuntungan materi imbalan yang lebih besar.

Pada struktur Badan Usaha Milik Negara bidang kehutanan Perum Perhutani mandor menempati posisi sebagai pekerja pelaksana. Tugasnya sebagai pekerja lapangan pada wilayah-wilayah hutan komersial yang dikelola perhutani. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2003 Perum Perhutani merupakan BUMN yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan ketiagan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip regulasi yang sudah ditetapkan. Mandor sendiri memiliki tugas sesuai dengan bidang spesialisasinya masing-masing ditiap hutan. Berdasarkan aturan mandor memiliki kewenangan sebagai pelaksana tugas dilapangan yang mengawasi anggota dalam menjalankan tugas lapangan mulai dari penanaman, pemeliharaan, panen, hingga keamanan.

Adapula hal yang dibutuhkan untuk menjadi mandor yaitu diperlukan keterampilan, ilmu pengetahuan, jaringan sosial, serta jiwa kepemimpinan untuk memimpin sekelompok pekerja. Hadirnya mandor melahirkan pemimpin informal melalui ikatan sosial dan emosional sesama rekan kerja. Upaya yang dilakukan mandor untuk tetap menjaga eksistensinya dengan menggunakan strategi melestarikan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Maka mandor yang berperan sebagai perantara antara sumber daya dengan tenaga kerja diharapkan dapat mengontrol tenaga kerja dan pekerjaan supaya bisa beroperasi (Soemardi dkk, 2009: 862).

Melalui pemaparan di atas bahwasannya tidak semua orang dapat menjadi mandor dalam dunia kerja. Maka bisa artikan posisi mandor memberikan keuntungan pada individu yang menempati posisi tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketika individu sudah menjabat sebagai mandor maka mereka memiliki *privilege* dimana memiliki sifat yang tidak dimiliki orang lain. Pada saat individu sudah menjabat sebagai mandor berdasarkan uraian diatas maka bisa disebut memiliki kriteria status sosialnya lebih tinggi daripada pegawai biasa. Sehingga mandor menduduki posisi strategis dalam menjalankan pekerjaannya.

1.6.2 Konsep kekuasaan

Politik menurut Harold D. Laswell dalam bukunya *Who Gets What, When, How* mengatakan politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Pada kegiatan politik tentunya tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan kekuasaan dalam masyarakat. Pada ilmu politik kekuasaan dianggap sebagai inti dari politik dapat didefinisikan bahwa semua kegiatan yang memiliki keterkaitan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan merupakan bentuk kekuasaan (Budiardjo, 2008: 18). Dalam ilmu politik konsep kekuasaan paling banyak dibahas, hal tersebut dikarenakan konsep ini sangat krusial dalam ilmu politik dan politik identik dengan kekuasaan. Banyak definisi dari beberapa ahli mengenai kekuasaan, menurut Miriam Budiardjo kekuasaan merupakan kemampuan seorang

pelaku untuk mempengaruhi perilaku seseorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan (Budiardjo, 2008: 60). Pada formula ini pelaku dapat berbentuk sekelompok orang, seseorang, atau suatu kolektivitas. Dapat diumpamakan seperti pendapat Robert Dahl kekuasaan merupakan jika A mempunyai kekuasaan atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan (*A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do*) (Dahl dikutip oleh (Budiardjo, 2008: 67).

Dalam praktiknya dapat disebut sebagai kekuasaan jika A berhasil memberikan pengaruh pada B untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diinginkan oleh B namun atas persuasi dari A maka B memilih melakukan tindakan sesuai dengan arahan A. Namun jika A memberikan pengaruh kepada B dimana sejak awal B sudah menginginkan kehendak sesuai harapan A tidak dapat dikategorikan dalam bentuk kekuasaan. Oleh sebab itu kekuasaan dimaknakan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki tiap individu untuk memberikan pengaruh pada pihak lain, dengan demikian pihak lain akan mematuhi sesuai arahan dari individu yang memberikan pengaruh. Dalam melakukan kekuasaan tentunya harus melibatkan interaksi antara pihak dipengaruhi dengan yang mempengaruhi ataupun yang satu memberikan pengaruh dan yang lain menjalankan arahan dari pengaruh tersebut. Maka kekuasaan selalu berlangsung melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, sehingga ada hubungan antara dua pihak atau bisa lebih.

Terdapat juga pendapat mengenai kekuasaan yang sering digunakan oleh para sarjana yaitu milik sosiolog Max Weber. Kekuasaan adalah kemampuan dalam hubungan sosial untuk melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar dari kemampuan tersebut (Weber dikutip oleh (Budiardjo, 2008: 60). Agar upaya dapat berhasil memberikan pengaruh terhadap pihak lain tidak semua orang dapat mempraktikkan jika tidak memiliki sumber daya kekuasaan. Dimana dalam

dimensi kekuasaan terdapat sumber kekuasaan untuk keberhasilan praktik berkuasa. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan (Budiardjo, 2008: 62). *Pertama*, kedudukan misalnya seseorang menduduki jabatan (komandan) dapat memerintah pegawainya, ketika diperintah harus melaksanakan perintah. *Kedua*, kekayaan misalnya pengusaha kaya memiliki kekuasaan atas seorang politikus. Sumber kekuasaan kekayaan tidak hanya dari materi saja namun juga bisa dari kekayaan kepemilikan informasi, tanah, senjata, dan sebagainya. *Ketiga*, kepercayaan atau agama. Biasanya dimiliki oleh alim ulama yang kekuasaan terhadap umatnya, sehingga ulama dianggap sebagai pimpinan informal yang perlu diikuti sertakan pada proses pembuatan keputusan.

Kemudian terdapat dua istilah yang menyangkut konsep yaitu *scope of power* dan *domain of power* (Nagel dikutip oleh (Budiardjo, 2008: 62). *Scope of power* atau cakupan kekuasaan memberitahukan pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan. Contohnya komandan memecat prajurit (asal sesuai pada ketentuan yang berlaku tetapi tidak memiliki kekuasaan terhadap prajurit di luar hubungan kerja. *Domain of power* atau wilayah kekuasaan menjawab pertanyaan siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, maka menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan. Semisal komandan memiliki kekuasaan atas semua prajurit baik di pusat ataupun di cabang.

Pada hubungan kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lainnya. Jadi, selalu ada hubungan tidak asimetris atau tidak seimbang. Ketidaksetaraan ini yang sering menimbulkan ketergantungan dan hubungan ketimpangan lebih besar pula sifat ketergantungannya. Dari pihak yang memiliki kuasa atas orang atau kelompok cenderung mengutamakan segi positif dari kekuasaan. Untuk tujuan positif dan negatif, dimaksudkan melalui kekuasaan positif untuk menjalankan kekuasaan agar tercapai. Sedangkan tujuan negatif diterapkan agar bisa mencegah pihak lain mencapai tujuan. Kekuasaan menurut mereka memberikan peluang

untuk mencapai konsensus dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Parsons dikutip oleh (Budiardjo, 2008: 63). Dalam hal ini Talcott Parsons dominan melihat kekuasaan sebagai alat ampuh untuk mencapai keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif (Budiardjo, 2008: 63). Jadi untuk mencapai kepentingan penguasa akan menggunakan konsensus sebagai sarana seperti nilai kebaikan bersama, moralitas, dan ajaran agama.

1.7 Kerangka Teoritik

1.7.1 Teori Sosial Kapital

Sosial kapital dapat dipahami dengan mudah jika berangkat dari makna kapital yang dapat ditelusuri gagasan milik Marx, yangmana dalam analisisnya mengenai sumber kapital dari hubungan sosial antara kaum borjuis kapitalis dan kaum buruh diproses produksi dan konsumsi komoditas (Marx dikutip oleh (Lin, 2001: 4). Gagasan Marx pada kapital sebagai bentuk dari nilai lebih yang diciptakan dari proses produksi dan pertukaran komoditas untuk menghasilkan nilai keuntungan lebih. Melalui penafsiran mengenai ide Marx tentang kehadiran kapital muncul dari hubungan sosial antara kapitalis dan buruh dalam proses produksi dan konsumsi komoditas (Marx dikutip oleh (Lin, 2001: 4). Lahirnya kapital melalui proses yang diturunkan dengan sumber daya (seperti kepemilikan tanah atau warisan) untuk memulai memproduksi komoditas dengan membangun hubungan pertukaran dengan buruh yang tenangnya berkontribusi dalam proses produksi. Sehingga kapitalis memberikan imbalan kepada pekerja sesuai dengan nilai tukar biasanya dalam bentuk uang (Lin, 2001: 4).

Seiring berkembangnya waktu saat ini buruh mengalami pergeseran dari teori marxian klasik menuju teori neo-kapital. Dalam analisis Marxian asli, buruh menawarkan kerja mereka dengan imbalan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi sosial kapital mengasumsikan bahwa buruh mungkin berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan, jika keuntungan didefinisikan sebagai nilai lebih untuk apa biaya hanya untuk mempertahankan hidup mereka. Godaan kemewahan dan gaya hidup,

serta kemungkinan untuk reinvestasi, dilihat oleh Marx secara eksklusif dalam kepemilikan kapitalis, sekarang mungkin dalam upaya dan genggamannya buruh juga (Marx dikutip oleh (Lin, 2001: 6). Di lain kata, modal seperti yang diproduksi dan dipertukarkan, mungkin juga bermakna bagi kapitalis serta buruh yang terlibat dalam proses produksi. Buruh tidak hanya mempertahankan sebagian nilai lebih dari kerja buruh sendiri. Melainkan buruh mengharapkan mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang berguna agar para buruh bisa menjual hasil karya buruh kepada produsen. Tindakan seperti ini agar buruh dapat mendapatkan bagian yang lebih besar dari nilai lebih tenaga kerja dalam proses produksi.

Tidak semua ahli teori neo-kapital setuju dengan interpretasi manusia kapital sebagai produk dari kehendak bebas atau kepentingan pribadi pekerja. Bourdieu melihat sumber daya dalam tiga bentuk: sebagai sumber daya ekonomi, sumber daya budaya, dan sumber daya sosial (Bourdieu dikutip oleh (Lin, 2001: 22). Baginya, sosial kapital “dibuat” kewajiban atau hubungan sosial artinya agregasi dari sumber daya potensial terkait dengan kepemilikan barang tahan lama jaringan hubungan yang dilembagakan dari kenalan timbal balik dan pengakuan – atau dengan kata lain, keanggotaan dalam suatu kelompok. Dengan kata lain Bourdieu melihat sosial kapital sebagai bentuk modal yang dimiliki oleh anggota jaringan sosial atau kelompok. Melalui koneksi di antara anggota, sumber daya dapat digunakan oleh anggota sebagai aset. Dalam pengertian ini, sosial kapital adalah aset kolektif yang memberikan kredit kepada anggota, dan dipertahankan dan diperkuat untuk kegunaannya ketika anggota terus berinvestasi di hubungan.

Bagi Coleman, sosial kapital terdiri dari dua elemen yaitu, aspek dari struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan tertentu individu dalam struktur (Coleman dikutip oleh (Lin, 2001: 23). Apakah ada aspek struktural yang merupakan modal tergantung pada apakah itu berfungsi untuk individu tertentu yang terlibat dalam kegiatan tertentu. Untuk alasan ini, sosial kapital tidak dapat dipertukarkan lintas individu atau aktivitas. Sosial

kapital adalah sumber daya, nyata atau potensi, diperoleh dari hubungan. Dalam skema aksi sosialnya, Coleman menggambarkan bagaimana aktor melakukan kontrol atas sumber daya yang mereka minati, dan bagaimana mereka juga tertarik pada acara (atau hasil dari peristiwa) yang setidaknya sebagian dikendalikan oleh pihak lain aktor. Dengan demikian, agar kepentingan mereka memperoleh keuntungan dari hasil suatu peristiwa, aktor terlibat dalam pertukaran dan transfer sumber daya.

Karya Putnam tentang partisipasi dalam organisasi sukarela dalam masyarakat demokratis seperti Amerika Serikat sangat mencerminkan penggunaan perspektif sosial kapital. Putnam berpendapat bahwa asosiasi sosial seperti itu dan tingkat partisipasi menunjukkan sejauh mana sosial kapital dalam suatu masyarakat. Asosiasi dan partisipasi ini mempromosikan dan meningkatkan norma-norma kolektif dan kepercayaan, yang merupakan pusat produksi dan pemeliharaan kesejahteraan kolektif (Putnam dikutip oleh (Lin, 2001: 23). Sementara dua perspektif menggambarkan sosial kapital secara berbeda dalam hal tingkat dimana utilitas atau hasil dapat dinilai, semua para sarjana tetap berkomitmen pada pandangan bahwa itu adalah anggota yang berinteraksi yang memungkinkan pemeliharaan dan reproduksi aset sosial ini.

Lin berpendapat bahwa ada dua jenis sumber daya: seorang individu dapat memperoleh akses ke dan menggunakan: sumber daya pribadi dan sumber daya sosial (Lin, 2001: 21). Sumber daya pribadi adalah sumber daya yang dimiliki oleh seorang individu dan dapat mencakup kepemilikan materi serta barang simbolis (mis., ijazah dan gelar). Sumber daya sosial adalah sumber daya yang diakses melalui koneksi sosial individu. Tergantung pada ekstensi dan keragaman koneksi sosial mereka, individu memiliki perbedaan sumber daya sosial. Jadi, dari Bourdieu, Coleman, Lin, dan Putnam melalui berbagi pemahaman bahwa sosial kapital terdiri dari sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial dan struktur sosial, yang dapat dimobilisasi ketika seorang aktor ingin meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam tindakan yang bertujuan.

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca peneliti mencoba mengklasifikasikan dalam tabel di bawah ini:

Tokoh	Definisi
Bourdieu	Sosial kapital didefinisikan sebagai agregat dari sumber daya potensial aktual yang terkait dengan kepemilikan jaringan dimana sudah bertahan lama. Sehingga Melalui jaringan koneksi di antara anggota, sumber daya dapat digunakan oleh anggota sebagai aset.
Colemen	Sosial kapital terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu, dan sosial kapital sifatnya produksi dimana aktor selalu menggunakan sosial kapital untuk mencapai kepentingan.
Putnam	Sosial kapital berkaitan dengan jumlah kepercayaan yang tersedia dalam masyarakat modern. Sosial diangkat dari individu dan kelompok kecil dalam komunitas lokal hingga menjadi kumpulan populasi besar dalam masyarakat.
Lin	Sosial kapital memberikan tekanan pada pendayagunaan sosial kapital oleh individual aktor. Fokus pembahasannya mengenai bagaimana aktor individual mengakses dan mendayagunakan sumber daya pada sosial kapital untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau manfaat sosial.

1.1 Tabel klasifikasi definisi sosial kapital

Sumber: Social Capital A Theory of Social Structure and Action
Nan Lin 2001

Berdasarkan tabel di atas setiap definisi dari para ahli memiliki fungsi sosial kapital yang berbeda-beda, dalam perspektif masing-masing ahli kemudian menghasilkan persamaan dan Woolcock untuk memetakan pemikiran mengenai sosial kapital dan merangkum sosial kapital dan merangkum fungsi sebagai berikut (Woolcock, 2001: 11-17). Pertama, sosial kapital yang mengikat atau *bounding*, artinya terdapat ikatan antara orang pada kondisi yang sama, contohnya teman akrab, tetangga, dan keluarga dekat. Kedua, sosial kapital yang menjembatani *bridging*, adalah mencakup ikatan yang sifatnya longgar dibandingkan dengan beberapa orang, misalnya, teman jauh dan rekan kerja. Ketiga, sosial kapital yang

menghubungkan atau *linking*, artinya digunakan untuk menjangkau orang-orang yang berada pada situasi yang berbeda, semisal mereka yang sepenuhnya tidak masuk dalam komunitas sehingga anggotanya dalam memanfaatkan sumber banyak daya.

Melalui berbagai perspektif mengenai sosial kapital oleh para ahli teori sosial kapital milik Nan Lin memiliki perbedaan dengan yang lainnya. *Pertama*, Bourdieu, bentuk elemen sumber daya yang terdapat dalam sosial kapital meliputi sumber daya (*resources*) baik aktual maupun virtual (*potensial*), jejaring dan relasi-relasi yang saling menghargai atau memberi perhatian. Para aktor yang terlibat dalam jalinan relasi mendambakan sebuah jalinan relasi sosial yang dapat digunakan sebagai sumber daya (*resources*) yang mendatangkan keuntungan ekonomi ataupun manfaat sosial. *Kedua*, Colmen, terdiri dari bentuk sumber daya berupa relasi saling menguntungkan, *trust*, dan interdependensi. *Ketiga*, Putnam, dalam sosial kapital terdapat bentuk dari sumber daya nilai-nilai kolektif, konsensus, dan integrasi sosial. *Keempat*, Lin, pada sosial kapital memiliki dua kategori sumber daya, yaitu sumber daya sosial yang sifatnya sebagai harta bersama dan sumber daya individual. Dari keempat bentuk kategori sumber daya sosial sebagian besar terfokus pada penggunaan modal atau sumber dayanya saja.

Sedangkan peneliti menggunakan teori sosial kapital milik Nan Lin dan studi dimana tidak hanya fokus pada penggunaan modal saja namun Lin juga menyinggung mengenai cara mobilisasi sumber daya yang sudah tertanam dalam struktur masyarakat. Perspektif Nan Lin, pertama menjelaskan bahwa sosial kapital lebih tepat sebagai aset relasional, tetapi kepercayaan, norma, dan sanksi adalah aset atau harta yang sifatnya bersama. Karakteristik kepercayaan, norma, dan sanksi berbeda dengan sosial kapital, sehingga tidak dapat dicirikan sebagai bentuk lain dari sosial kapital, tetapi adanya aspek tersebut sebagai fasilitas untuk membangun hubungan dan jaringan sosial dan potensi pemanfaatan sumber daya. Kedua, hubungan dan jaringan sosial menunjukkan bahwa hubungan intens

memiliki dampak yang signifikan terhadap sosial kapital. Hubungan intens dapat memperkuat kepercayaan atau nilai-nilai positif, norma, sanksi, bahkan kewenangan. Melalui kedekatan hubungan yang dekat ini juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang tersedia pada jaringan secara optimal. Ketiga, tidak hanya Lin saja namun mayoritas pakar seperti Colmen, Putnam, dan Bourdieu sepakat bahwa fungsi sosial kapital sebagai sumber daya untuk memfasilitasi para aktor untuk bertindak mencapai tindakan sesuai dengan kepentingan aktor.

Sosial kapital didefinisikan memungkinkan pembaca untuk merumuskan proposisi teoretis, untuk mengidentifikasi sumber modal sosial dan pengembalian modal sosial Lin mengidentifikasi tiga sumber utama (Lin 2001: 46) untuk sosial kapital: (1) posisi struktural (posisi aktor dalam struktur hierarkis) stratifikasi sosial (proposisi kekuatan posisi), (2) lokasi jaringan (lokasi aktor dalam jaringan yang menunjukkan fitur tertentu, seperti penutupan atau keterbukaan atau menjembatani, dan (3) tujuan tindakan (instrumental misalnya, untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau reputasi, atau ekspresif misalnya, untuk memelihara kohesi, solidaritas, atau kesejahteraan). Proposisi, tersebut dihubungkan pada sumber dan jenis tindakan ini dengan sosial kapital dalam urutan kausal. Teori sosial kapital berfokus pada sumber daya yang tertanam dalam diri seseorang jejaring sosial dan bagaimana akses ke dan penggunaan sumber daya tersebut bermanfaat bagi tindakan individu (Lin, 2001: 55).

Sumber daya didefinisikan sebagai barang berharga dalam masyarakat, bagaimanapun ditentukan secara konsensual, kepemilikan yang mempertahankan dan mempromosikan kepentingan pribadi untuk kelestarian dan kelangsungan hidup. Nilai tersebut adalah penilaian normatif yang diberikan pada barang-barang ini. Bagi sebagian besar masyarakat, mereka berhubungan dengan kekayaan, reputasi, dan kekuasaan. Teori sosial kapital berfokus pada tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan mempertahankan atau memperoleh sumber daya yang berharga. Sumber daya dapat dianggap berasal atau diperoleh dari mereka

yang dilahirkan dengan, seperti jenis kelamin dan ras. Sumber daya lain ditentukan oleh warisan, seperti kasta dan terkadang agama, dan mungkin termasuk sumber daya orang tua. Sumber daya juga dapat diperoleh melalui pendidikan, pekerjaan bergengsi atau berwibawa. Ketika sumber daya sedang diinvestasikan untuk pengembalian yang diharapkan di pasar, maka sumber daya menjadi modal sosial.

Modal dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: (1) modal pribadi atau manusia dan (2) modal sosial (Lin, 2001: 55). Modal manusia terdiri dari sumber daya yang dimiliki oleh individu, yang dapat menggunakan dan membuangnya dengan sangat bebas dan tanpa banyak memperhatikan kompensasi. Modal sosial terdiri dari sumber daya yang tertanam dalam jaringan atau asosiasi seseorang. Untuk bisa dispesifikasikan sebagai teori sosial kapital Lin mengklarifikasi hubungan antara tujuan tindakan (yaitu, instrumental atau ekspresif), fitur jaringan (misalnya, kepadatan, ikatan atau jembatan). Artikulasi ini mengkonseptualisasikan tindakan ekspresif atau instrumental pada lapisan hubungan di jejaring sosial dan sumber daya yang tertanam untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa kebingungan dalam literatur umum terkait apa yang disebut "*bonding*" atau "*bridging*" pada sosial kapital (Woolcock and Narayan, 2000: 230; Putnam, 2000: 22-24). Sosial kapital bentuknya tidak mengikat atau menjembatani. Melainkan sifat jaringan sosial yang mengikat atau menjembatani yang memberikan keuntungan relatif dari jaringan yang mengikat menjembatani sosial kapital (mengakses dan memobilisasi)

Teori sosial kapital dibingkai dalam serangkaian asumsi tentang struktur makro, meso, dan mikro masyarakat. Untuk struktur makro, teori mengajukan tiga asumsi. Pertama, teori dimulai dengan gambaran struktur sosial, yang terdiri dari seperangkat posisi yang diurutkan berdasarkan sumber daya tertentu yang dinilai secara normatif seperti kelas, otoritas, dan status. Lebih lanjut mengasumsikan bahwa struktur memiliki bentuk piramida dalam hal aksesibilitas dan kontrol sumber daya tersebut. Semakin tinggi posisinya, semakin sedikit penghuninya dan semakin tinggi

posisinya, semakin baik tampilan strukturnya (terutama di bawah). Dalam hal jumlah penghuni dan aksesibilitas ke posisi, struktur piramida menunjukkan keuntungan untuk posisi yang lebih dekat ke atas. Posisi yang lebih dekat ke puncak struktur memiliki akses dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya yang berharga bukan hanya karena sumber daya yang lebih berharga secara intrinsik melekat pada posisi itu, tetapi juga karena aksesibilitas posisi yang lebih besar ke posisi di peringkat lain (terutama yang lebih rendah).

Dengan demikian, seorang individu yang menempati posisi yang lebih tinggi, karena aksesibilitasnya ke lebih banyak posisi, juga memiliki komando modal sosial yang lebih besar. Dengan gambaran struktur sosial dan pemahaman tentang sumber daya yang tertanam seperti itu, tampak jelas bahwa ada hubungan langsung antara tingkat posisi dalam struktur hierarkis dan besarnya pengaruh yang mungkin diberikannya pada posisi lain (lebih rendah) untuk instruktur. Tujuan mental (memperoleh sumber daya tambahan), serta jumlah informasi yang dimilikinya tentang lokasi sumber daya dalam struktur. Faktor pengaruh berasal dari kemampuan posisi yang lebih tinggi untuk mengumpulkan sumber daya pada tingkat yang lebih tinggi daripada posisi yang lebih rendah. Jadi, bantuan apa pun yang dapat diberikan oleh seseorang pada posisi yang lebih tinggi dapat diharapkan memiliki hasil yang lebih besar di masa depan, karena posisi yang lebih tinggi memiliki lebih banyak untuk menawarkan posisi yang lebih rendah daripada sebaliknya. Faktor informasi dikaitkan dengan hubungan jaringan asimetris di seluruh tingkat posisi. Posisi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak informasi atau pandangan yang lebih baik tentang struktur daripada posisi yang lebih rendah, dengan demikian lebih mampu menemukan sumber daya tertentu yang tertanam dalam struktur.

Kedua, teori mengasumsikan bahwa sementara berbagai sumber daya bernilai membentuk dasar struktur hierarkis dan setiap sumber daya bernilai mendefinisikan hierarki tertentu, hierarki ini cenderung ke arah

kesesuaian dan transferabilitas. Artinya, cenderung ada korespondensi antara posisi hierarkis di seluruh dimensi sumber daya. Penghuni dengan posisi yang relatif tinggi pada satu dimensi sumber daya juga cenderung menempati posisi yang relatif tinggi pada dimensi sumber daya yang lain. Misalnya, seseorang dengan posisi yang relatif tinggi dalam struktur pekerjaan juga cenderung memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar. Ketika konvergensi tersebut tidak lengkap secara fungsional (tidak isomorfik), pertukaran sumber daya lintas dimensi tidak hanya mungkin tetapi, di sebagian besar masyarakat, eksplisit dan diharapkan.

Ketiga, teori mengasumsikan bahwa struktur hierarki ini cenderung piramidal, tingkat atas memiliki penghuni lebih sedikit daripada tingkat yang lebih rendah. Struktur empiris mungkin tidak benar-benar terlihat piramidal karena setiap struktur tersebut berkembang dan bergeser ke arah set level yang didefinisikan ulang. Sebagai contoh, sebagai industrialisasi berlangsung (didefinisikan sebagai proses pengembangan teknologi untuk membuat peralatan mesin dan diasumsikan dapat diamati di setiap masyarakat modern), struktur pekerjaan menyimpang dari struktur piramida sebagai penghuni beralih dari sektor pertanian ke nonpertanian. Untuk meso- dan mikro, teori membuat dua asumsi tentang interaksi dan tindakan. Pertama, mengasumsikan bahwa interaksi sosial lebih mungkin terjadi di antara individu-individu pada tingkat hierarki yang sama atau berdekatan—prinsip interaksi homopili. Mengikuti asumsi struktural tentang kesesuaian dan transferabilitas sumber daya, pertukaran yang diharapkan atau adil melibatkan mitra yang dapat menawarkan serta menerima sumber daya. Dengan demikian, semakin dekat atau semakin mirip posisi sosial, semakin besar kemungkinan penghuni akan berinteraksi satu sama lain.

Teori ini mengasumsikan bahwa dua kekuatan pendorong utama bertanggung jawab atas tindakan sebagian besar individu: mempertahankan sumber daya yang berharga dan memperoleh sumber daya yang berharga. kesatu, mendikte tindakan yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan sumber daya berharga yang sudah tersedia bagi individu,

sedangkan yang kedua mempromosikan tindakan yang dilakukan untuk menambah sumber daya berharga yang belum dimiliki individu. Kita dapat mencirikan mereka sebagai tindakan ekspresif dan instrumental, masing-masing. Tindakan ekspresif diharapkan menghasilkan interaksi yang sesuai dengan prinsip interaksi homopili. Pengakuan kesamaan sumber daya dan kebutuhan untuk membalas kekhawatiran tentang mereka dan melindungi mereka merupakan dasar untuk interaksi yang memuaskan. Artinya, untuk tujuan memperoleh sumber daya tambahan, tindakan yang lebih efektif cenderung dimulai terhadap orang lain yang memiliki sumber daya yang berbeda (dan mungkin lebih baik), konsisten dengan prinsip interaksi heterofil. Jadi, teori yang menghubungkan individu dengan struktur harus terlebih dahulu membedakan dua kelas tindakan yaitu, tindakan instrumental dan tindakan ekspresif. Tindakan instrumental adalah tindakan yang diambil untuk tujuan mencapai tujuan tertentu. Ciri khas dari kelas tindakan ini adalah bahwa sarana dan tujuan terpisah dan berbeda. Contoh tipikal adalah pencarian pekerjaan atau seseorang. Tindakan ekspresif diambil untuk kepentingan mereka sendiri: tindakan adalah sarana dan tujuan, dan terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Mengungkapkan perasaan seseorang adalah contoh yang khas.

Kedua, teori harus memperhitungkan konsistensi atau ketegangan antara tindakan dan interaksi. Tindakan ekspresif memotivasi individu untuk mencari orang lain yang memiliki karakteristik dan gaya hidup yang sama untuk berbagi dan curhat sehingga diperoleh timbal balik yang diharapkan, pengertian dan konseling yang simpatik dan apresiatif. Karena interaksi homopili adalah jenis interaksi normatif, maka tindakan ekspresif membangkitkan interaksi normatif (interaksi homopili). Artinya, ada kecocokan normatif antara usaha dan pengembalian. Di sisi lain, tindakan instrumental memotivasi seseorang untuk mencari orang lain dengan karakteristik dan gaya hidup yang berbeda (dan, diharapkan, lebih baik) untuk mengakses informasi dan pengaruh untuk mencapai pengembalian yang diharapkan dari sumber daya yang lebih banyak dan/atau lebih baik.

Dengan demikian, interaksi heterofil mewakili ketidakcocokan potensial antara upaya yang luar biasa atau "abnormal" dan hasil yang diharapkan untuk tindakan yang bertujuan (instrumental). Karena ketidaksesuaian antara tindakan instrumental dan pola interaksi normatif, teori modal sosial harus memberikan perhatian khusus pada proses di mana tindakan instrumental menjadi sukses melalui modal sosial.

Dalam pendekatan sosial kapital, kapital dipandang sebagai aset berdasarkan koneksi aktor dan akses ke sumber daya di jaringan atau kelompok di mana mereka menjadi anggotanya (Lin, 2001: 19). Pada teori sosial kapital kategori pasar merupakan ekonomi, politik, tenaga kerja, atau komunitas (Lin, 2001: 19). Maka individu yang terlibat dalam interaksi dan jaringan secara keberlanjutan supaya menghasilkan keuntungan. Secara umum menurut Lin sumber daya sosial kapital dapat bekerja melalui beberapa elemen (Lin, 2001: 20) yang tertanam dalam jaringan sosial sebagai berikut. *Pertama*, adanya keterjangkauan informasi, biasanya ditemukan dalam situasi pasar yang tidak sempurna dimana ikatan sosial terletak pada lokasi strategis. Oleh karena itu, memberikan keuntungan informasi mengenai permintaan dan kebutuhan pasar dapat memberikan individu dengan informasi yang berguna tentang peluang dan pilihan lain tidak tersedia. Sehingga adanya fasilitas informasi yang diberikan akan mengurangi biaya transaksi bagi individu untuk memenuhi kebutuhan.

Kedua, ikatan sosial dapat memberikan pengaruh pada agen yang memainkan peran penting dalam keputusan (seperti perekrutan atau promosi) yang melibatkan aktor. Terlebih jika ikatan sosial berada di lokasi yang strategis misalnya lubang struktural dan masuk dalam posisi memiliki kapasitas pengawasan atau kewenangan. Sehingga posisi strategis ini membawa sumber daya yang lebih berharga dan memberikan kekuatan yang lebih besar contohnya hubungan asimetri dalam ketergantungan oleh agen, pada agen organisasi pengambilan keputusan. *Ketiga*, ikatan sosial yang sudah mendapatkan pengakuan dari jaringan sosial, diartikan bahwa sebagai seseorang yang mendapatkan sertifikasi sosial mencerminkan aksesibilitas

individu ke sumber daya melalui jaringan dan hubungan sosial hingga modal hubungan sosialnya. Sehingga individu dengan ikatan ini dapat meyakinkan bahwa individu tersebut dapat memberikan sumber daya tambahan diluar modal pribadi.

Akhirnya, hubungan sosial diharapkan untuk memperkuat identitas dan pengakuan. Diyakinkan dan diakui kelayakannya sebagai individu dan anggota kelompok sosial yang berbagi hal serupa minat dan sumber daya tidak hanya memberikan dukungan emosional tetapi juga pengakuan publik atas klaim seseorang atas sumber daya tertentu. Penguatan ini sangat penting untuk pemeliharaan kesehatan mental dan hak atas sumber daya. Melalui beberapa elemen ini – informasi, pengaruh, kredensial sosial, dan penguatan – dapat menjelaskan mengapa modal sosial bekerja dalam tindakan instrumental dan ekspresif yang tidak diperhitungkan oleh bentuk modal pribadi seperti modal ekonomi atau manusia. langkah-langkah apa yang dapat disarankan sebagai indikator modal sosial lin merekomendasikan mengikuti argumen Weber, tiga jenis sumber daya ikatan sosial yang diakses sebagai isi modal sosial: (1) kekayaan, berupa aset ekonomi, (2) kekuasaan, berasal dari aset politik, dan (3) reputasi, didapatkan dari aset sosial. Tiga karakteristik rangkuman yang dapat disarankan relatif terhadap setiap modal. Kesatu, keterjangkauan atas sumber daya terbaik yang diakses melalui ikatan sosial. melalui keterjangkauan langsung tampaknya sumber daya dari ego posisinya paling atas dapat mencapai dalam struktur hierarkis melalui ikatan sosial. Ego terhubung ke posisi lain dalam struktur; posisi tertinggi yang dapat dicapai ego mewakili sumber daya sosial yang dapat dijangkau oleh ego. Posisi itu dicirikan oleh nilai-nilai sumber daya yang dimilikinya, biasanya mencerminkan status relatif, kelas, atau otoritas dalam struktur atau komunitas.

Kedua, heterogenitas, rentang posisi yang sumber dayanya dapat dijangkau melalui ikatan sosial. Heterogenitas sumber daya, mencerminkan rentang vertikal sumber daya yang dapat dijangkau oleh ego melalui ikatan

sosial di seluruh posisi dalam hierarki struktural. Diwakili oleh kisaran antara sumber daya tertinggi dan terendah yang dapat dicapai melalui ikatan ego. Kriteria heterogenitas sumber daya tidak begitu jelas, tetapi penting (Lin, 2001: 62). Misalnya, seseorang yang tidak tahu cara meningkatkan memori komputer untuk menjalankan aplikasi tidak perlu menghubungi pemrogram handal cukup untuk memanggil seseorang yang ramah yang dapat dengan cepat membantu. Ketiga, ekstensi, jumlah posisi yang dapat dijangkau. Ekstensi, hanya mencerminkan keragaman posisi, dan sumber daya yang tertanam, dapat dicapai oleh ego melalui ikatan sosial. Dengan adanya sumber daya yang dimiliki dari sosial kapital menjadikan aktor termotivasi untuk mempertahankan atau memperoleh sumber daya mereka dalam tindakan sosial untuk mencapai tujuan. Dimana menurut lin tindakan untuk mempertahankan sumber daya disebut sebagai ekspresif dan tindakan untuk mendapatkan sumber daya disebut tindakan instrumental (Lin, 2001: 75). Mempertahankan sumber daya adalah motivasi utama untuk bertindak, oleh sebab itu tindakan ekspresif adalah bentuk utama dari strategi yang dilakukan dari tindakan keberhasilan mempertahankan keberhasilan.

Strategi sederhana untuk mencapai tindakan yang bertujuan adalah mengakses aktor yang memiliki atau dapat mengakses sumber daya yang lebih bernilai tinggi. Pertama, ia memanfaatkan pengaruh yang mungkin dilakukan perantara ini atas nama ego. Semakin baik posisi perantara, dan dengan demikian semakin baik sumber daya yang disematkan dan diperintahkan, semakin banyak pengaruh seperti itu akan menguntungkan ego. Kedua, perantara, mengingat pandangannya yang menguntungkan tentang struktur, dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada ego. Ketiga, perantara yang diposisikan lebih baik, dengan sumber daya yang tertanam dan diperintahkan, memproyeksikan kredensial sosial yang lebih baik, sehingga kesediaannya untuk melayani sebagai perantara menjamin atau meningkatkan kredensial ego. Dan, akhirnya, kemampuan untuk mengakses perantara dengan posisi yang lebih baik itu sendiri meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri dalam interaksi dan tindakan

lebih lanjut (misalnya, perilaku dalam wawancara kerja) yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan tindakan.

Dapat diartikulasikan bahwa teori sosial kapital Nan Lin berbasis jaringan. Dipahami sebagai investasi dalam sumber daya yang tertanam dalam jaringan sosial, modal sosial berfokus pada sumber daya (misalnya, kekayaan, kekuasaan, dan reputasi) ikatan yang dapat diakses oleh aktor, individu atau kolektivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Sejumlah masalah dibahas untuk mengurangi konseptualisasi dan analisis tertentu yang membingungkan dan membingungkan yang lazim dalam literatur saat ini. Ditunjukkan, misalnya, dua pendekatan dapat digunakan untuk menilai efek modal sosial: kapasitasnya (sumber daya yang diakses) dan penggunaan aktual untuk tindakan tertentu (sumber daya yang dimobilisasi). Diskusi juga menyerukan pengukuran yang ketat dan sistematis ditambah dengan teori. Perkembangan terkini dalam metodologi pembangkit posisi memfasilitasi program penelitian yang sekarang dapat didasarkan pada persyaratan teoritis dan pengukuran yang tepat. Elaborasi penting lainnya menyangkut klarifikasi hubungan dan jaringan yang mengikat, mengikat dan menjembatani, dan menunjukkan bagaimana fitur jaringan ini dapat memengaruhi efek modal sosial, bergantung pada tujuan tindakan – instrumental atau ekspresif. Ini juga menjelaskan kelayakan dan kegunaan teori dan pengukurannya untuk aktor kolektif maupun individu. Masalah lain masih harus dieksplorasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Eksistensi Mandor dalam Pemanfaatan Hutan di Desa Bareng Kecamatan Sugihwarasa Kabupaten Bojonegoro” penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan untuk mengetahui secara mendalam terkait permasalahan pada pengelolaan hutan di Desa Bareng masih ditemukan praktik ilegal yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Adanya kualitatif dalam ilmu sosial digunakan untuk memahami masalah sosial atau manusia melalui

perilaku individu atau kelompok (Creswell, 2014: 41). Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian fenomenologis adalah desain penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi dimana peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena yang dijelaskan oleh subyek penelitian (Creswell, 2014: 42). Fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana orang mengalami fenomena tertentu. Ahli fenomenologi mengeksplorasi bagaimana individu membangun makna mengenai pengalaman mereka dan bagaimana makna individu ini membentuk makna kelompok atau budaya (Aminah&Roikan, 2019: 70).

Sehingga alasan penulis menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dikarenakan memiliki karakteristik yang kompleks untuk mendapatkan pengalaman dari seorang mandor di Perum Perhutani dalam memanfaatkan potensi sosial-kapital yang dimiliki dalam pemanfaatan hutan sebagai upaya menjaga eksistensi di Desa Bareng Bojonegoro secara mendalam yang mana tidak bisa menggunakan melalui pendekatan kuantitatif dalam bentuk variabel. Serta pada penelitian kuantitatif sifatnya meluas sedangkan yang diperlukan untuk mengetahui perilaku sosial sifatnya harus mendalam

1.8.2 Lokasi Penelitian

Dalam memilih lokasi penelitian, peneliti fokus pada permasalahan eksistensi mandor dalam pemanfaatan hutan yang berada di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dikarenakan terdapat Desa yang dikelilingi hutan cukup luas. Berdasarkan data dari dokumen BKPH Desa Bareng memiliki luas wilayah 4.341,5 Ha. Luas hutan yang tersebar di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang luas ini memiliki permasalahan dalam pemanfaatan hutan, maka lokasi penelitian Desa Bareng cukup mewakili kriteria yang sesuai dengan topik penelitian. Selain itu kemudahan aksesnya dapat dicapai, sehingga hal tersebut akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data penelitian.

1.8.3 Jenis Data

Dalam penelitian terdapat data sekunder dan data primer, data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dari hasil penelitian untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu (Aminah&Roikan, 2019: 106). Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil peneliti lainnya yang dimungkinkan mempunyai tujuan penelitian yang berbeda (Aminah&Roikan, 2019: 106). Data yang diperoleh dari jenis data sekunder ini biasanya dari peneliti terdahulu atau sumber dari artikel, jurnal, berita, dan laporan data instansi. Sehingga melalui data sekunder memberikan kemudahan kepada peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam mengkategorikan perihal yang bisa memberikan pengaruh dari hasil analisis data sebelum analisis penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penelitian ini penulis menerapkan kedua sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data primer menggunakan cara wawancara dengan informan. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka, data-data dari instansi terkait seperti Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), dan website Perum Perhutani.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dapat dikatakan bahwasannya pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menemukan hasil dari penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dan wawancara. *Pertama*, observasi artinya peneliti mempelajari interaksi atau relasi orang-orang yang berkuasa dan yang dikuasai serta pihak yang diteliti tidak menyadari jika sedang diteliti (Aminah&Roikan, 2019: 67). Peneliti mengamati hubungan baik antara mandor dengan masyarakat sekitar Desa Bareng. Hasil observasi peneliti menjumpai mandor untuk mengisi waktu istirahat ketika bekerja membaur bersama masyarakat di warung untuk menikmati kopi dan makan siang. Selain itu mandor turut aktif dalam organisasi

masyarakat seperti menghadiri dan memberikan saran pada kumpulan karang taruna, PKK, dan LMDH.

Kedua, wawancara artinya dalam memperoleh informasi peneliti melakukan wawancara secara individual bersama informan yang akan memberikan data ataupun informasi kepada peneliti (Aminah&Roikan, 2019: 68). Orang yang dipilih dengan pertimbangan dan kriteria tertentu disebut sebagai informan. Dalam menentukan informan peneliti harus mempertimbangkan sesuai dengan kriteria tertentu. Untuk menentukan kriteria tersebut peneliti menggunakan teknik *purposive* yang mana pengambilan sumber data dilakukan dengan pertimbangan berbagai kriteria tertentu untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti. Teknik ini juga bertujuan untuk menggali sebanyak mungkin adanya berbagai informasi dari berbagai macam sumber (Moleong, 2005: 224).

Dengan begitu harapannya peneliti dapat menggali secara mendalam terkait permasalahan penelitian yang diajukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, informan berasal dari masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, pengusaha mebel, tokoh masyarakat yang berada disekitar Desa Bareng, mandor tanam, mandor pemeliharaan, mandor keamanan atau polisi hutan di bawah lingkup Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), dan kepala BPKH atau ASPER. Adapun alasan peneliti menentukan informan masyarakat petani yang tidak memiliki lahan, pengusaha mebel, dan tokoh masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan jual beli hasil hutan secara ilegal serta kegiatan alih fungsi lahan dari para mandor. Kemudian memilih para mandor dikarenakan dalam penelitian ini sebagai informan kunci yang menggunakan hutan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi. Sehingga untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara kepada seluruh mandor di Desa Bareng yang melakukan pemanfaatan hutan melalui kewenangan serta kekuasaan dalam menjaga keamanan dan pengelolaan hutan yang ada di Desa Bareng. Serta Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), Kesatuan Pemangkuan

Hutan (KPH), dan website Perum Perhutani yang tentunya memiliki kumpulan informasi data sekunder dari hasil lapangan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Dalam prosesnya peneliti akan menganalisis hasil wawancara yang sebelumnya sudah terkumpul dan menulis catatan diakhir untuk dinarasikan dalam hasil akhir sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan. Dalam proses analisis data kualitatif peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Langkah pertama menyiapkan data untuk dianalisis, ini melibatkan hasil wawancara dan mengklasifikasikan jenis data berbeda tergantung pada sumber informasi. Langkah kedua membaca secara cermat atau melihat semua data, langkah ini memberikan gambaran umum rasa informasi dan kesempatan untuk merefleksikan makna secara keseluruhan. Langkah ketiga memulai mengklasifikasikan semua data dengan memberikan tanda untuk menghasilkan deskripsi pengaturan atau kategori informan untuk dianalisis. Langkah keempat meningkatkan deskripsi dan tema yang nantinya direpresentasikan dalam narasi kualitatif.

Terakhir kelima dalam menganalisis data melibatkan interpretasi dalam penelitian kualitatif dari temuan atau hasil yang menjadi esensi dari penelitian (Creswell, 2014 :324). Setelah ditahap akhir hasilnya bisa menjadi interpretasi yang dituangkan dalam pemahaman di tiap penelitian. Dengan demikian interpretasi dalam penelitian kualitatif dapat mengambil banyak bentuk yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis desain penelitian dan menjadi fleksibel dalam menganalisis hasil temuan penelitian (Creswell, 2014: 325).